JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 8 No. 1, 2025, hal 70-87 ISSN 2746-3249

Mengukur Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Melalui Pendekatan Model Regresi Logistik

Abdul Rahman*
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Makassar
* abdul.rahman1582@unm.ac.id

Abstract
This study aims to measure community welfare at the district/city level in South Sulawesi Province using a binary logistic regression model approach. The research employs a quantitative method. The dependent variable is community welfare, measured by the Human Development Index (HDI), which is categorized into two groups (HDI < 71 and HDI ≥ 71). The independent variables include access to improved sanitation (SL), economic growth (PE), poverty (POV), and the open unemployment rate (TPT). The data used are secondary data obtained from the latest publications by the Central Statistics Agency (BPS). The analysis model used is binary logistic regression with the Maximum Likelihood Estimation (MLE) method. The results show that improved sanitation (SL) has a positive and significant effect on community welfare, economic growth (PE) has a significant negative effect, and the open unemployment rate (TPT) has a significant positive effect, while poverty (POV) does not have a significant effect on community welfare. These findings highlight the importance of strengthening basic infrastructure such as sanitation, transforming economic growth policies to be more inclusive, and creating productive employment opportunities in order to improve community welfare at the local level.
Keywords: *Community Welfare; HD; Logistic Regression; Sanitation; Economic Growth.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan melalui pendekatan model regresi logistik biner. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel dependen yang digunakan adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikategorikan menjadi dua kelompok (IPM < 71 dan IPM ≥ 71). Variabel independen meliputi sanitasi layak (SL), pertumbuhan ekonomi (PE), kemiskinan (POV), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terbaru. Model analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner dengan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanitasi layak (SL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh negatif signifikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif signifikan, sedangkan kemiskinan (POV) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur dasar seperti sanitasi, transformasi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat; IPM; Regresi Logistik; Sanitasi; Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN
Pembangunan daerah merupakan pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi,

tetapi juga oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator aktivitas ekonomi suatu perekonomian, tetapi telah keliru disebut sebagai ukuran kesejahteraan manusia yang sangat luas (Costanza dkk., 2009; Stiglitz, Joseph; Sen, Amartya; dan Jean, 2010). Senada dengan Kuznets (1934); Marcuss dan Kane (2007); McCulla, S H dan Smith (2007) menjelaskan bahwa GDP tidak pernah dikembangkan untuk mengukur kesejahteraan sosial ekonomi suatu bangsa, masih merupakan parameter yang paling umum dalam mengukur pertumbuhan secara keseluruhan dan kinerja negara mana pun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

United Nations Development Programme (UNDP) telah merumuskan pembangunan manusia dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) (Human Development Report., 1995). Komponen IPM diukur dengan tiga komponen, yaitu: pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan (Fajri, 2021). Lebih lanjut, di Indonesia, IPM menjadi acuan untuk menilai efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat. Peningkatan IPM akan mendorong kemakmuran daerah. Tingkat kemakmuran dapat dinilai dari segi kesehatan melalui angka harapan hidup, dari segi pendidikan melalui angka literasi dan rata-rata tahun sekolah, dan dari segi ekonomi dengan melihat pengeluaran riil per kapita (Darsyah dkk., 2018).

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi strategis di kawasan timur Indonesia menunjukkan dinamika pembangunan yang cukup pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan kesejahteraan di tingkat kabupaten/kota. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), ketimpangan antar wilayah di Sulawesi Selatan tercermin dari disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pengangguran, dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan sanitasi. IPM Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75,02, telah naik sebesar 0,63 poin sejak tahun 2023. Namun, diketahui dari IPM menurut provinsi di Indonesia bahwa 33 provinsi memiliki pembangunan manusia yang lebih rendah dari IPM Indonesia. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan IPM yang berada di bawah rata-rata nasional, sebesar 74,05 (BPS, 2024). Meskipun IPM di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan namun belum cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Sulawesi Selatan ke level yang diharapkan, meskipun secara absolut IPM meningkat. Selain itu, pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya.

Pentingnya mengukur kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif dan komprehensif di tingkat daerah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pembangunan dan menyusun intervensi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sebagaimana dinyatakan oleh Alkire & Foster (2011) dalam studi multidimensional *poverty measurement*, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, penguatan pembangunan berbasis kesejahteraan menjadi krusial untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tingkat lokal (UNDP, 2022). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Nansadiqa dkk., (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan tanpa disertai pemerataan akses layanan dasar. Di sisi lain, studi oleh Suryahadi dkk., (2009) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada tingkat nasional atau provinsi secara agregat, tanpa menggali variasi di tingkat kabupaten/kota, khususnya di Sulawesi Selatan. Misalkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia dilakukan oleh Darsyah dkk., (2018) dengan menggunakan metode pemodelan spasial di provinsi Jawa Tengah. Pertiwi dkk., (2023) juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di provinsi Papua dan Sumatera Barat dengan *Multivariate Adaptive Regression Spline*. Keduanya mengadopsi metode likelihood untuk memperkirakan parameter model dalam penelitian mereka. Sebaliknya, Ganiswari dkk., (2023) juga mempelajari pembangunan manusia di Indonesia Timur menggunakan perspektif pembelajaran mesin. Selain itu, pendekatan analisis yang digunakan sebagian besar bersifat linier biasa, belum mengadopsi model probabilistik seperti regresi logistik untuk mengkaji probabilitas kesejahteraan berdasarkan karakteristik daerah.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan baik dari sisi variabel, pendekatan metodologis, maupun interpretasi kebijakan. Dari sisi variabel, studi ini mengintegrasikan akses sanitasi layak sebagai salah satu determinan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penggunaan variabel sanitasi sebagai prediktor utama dalam model statistik masih relatif terbatas dalam literatur yang umumnya lebih memfokuskan pada pendidikan, kesehatan, atau pendapatan. Selain itu, pendekatan pengelompokan IPM menjadi dua kategori kesejahteraan (IPM < 71 dan IPM ≥ 71) memungkinkan analisis prediktif berbasis risiko dengan menggunakan model regresi logistik biner. Dari aspek metode, penggunaan model regresi logistik dengan pendekatan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) pada data lintas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pendekatan yang jarang digunakan dalam studi serupa di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai pengukuran kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pendekatan regresi logistik biner yang jarang digunakan dalam studi-studi serupa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya mengandalkan pendekatan regresi linier atau metode statistik deskriptif tanpa mempertimbangkan klasifikasi kesejahteraan dalam bentuk kategorikal sebagaimana diwakili oleh batas ambang IPM nasional. Penggunaan model regresi logistik memungkinkan interpretasi yang lebih tajam terhadap peluang peningkatan kesejahteraan berdasarkan faktor-faktor determinan.

Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur empiris terkait konteks lokal di Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dalam kajian pembangunan manusia berbasis data kuantitatif. Dengan mengintegrasikan indikator-indikator seperti sanitasi layak, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran terbuka dalam satu kerangka model prediktif, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan efektif di daerah.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan; 2) Menganalisis probabilitas kesejahteraan berdasarkan variabel-variabel sosial ekonomi utama menggunakan model regresi logistik; 3) Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan yang merata di Sulawesi Selatan.

PENELITIAN TERDAHULU

Pemikiran pembangunan tidak lagi semata menempatkan nilai moneter dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pendapatan per kapita, tetapi telah berkembang mencakup pengukuran-pengukuran nonekonomi. Van Den Berg (2005) menawarkan pengukuran pencapaian tujuan pembangunan ekonomi pada hal-hal yang lebih abstrak, terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang lebih fokus menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia (*human development*) atau biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembangunan manusia adalah proses memperbesar kebebasan bagi semua manusia dan bergantung pada kemampuan individu dan kebebasan untuk mencapai fungsi (Anand & Sen, 2000; Anand, Sidhir. Sen, 1994; Mark Mitchell, 2016; Robeyns, 2003, 2005, 2006; A. Sen, 1979; Amartya. K. Sen, 1980, 1982, 1988; UNDP, 2016). Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa pendapatan per kapita adalah penting tetapi bukan ukuran yang memadai untuk pembangunan manusia, tetapi meningkatkan kualitas hidup seperti yang terwujud dalam pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, akses yang lebih mudah ke pekerjaan dan kehidupan yang lebih sehat, keamanan pangan dan akses ke air portabel, perumahan yang terjangkau, lingkungan yang berkelanjutan dan harapan hidup yang lebih besar. Untuk memperkirakan fenomena ini secara sederhana, IPM diukur sebagai rata-rata geometris pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan (UNDP, 2016).

IPM memiliki tiga komponen penting dari pembangunan manusia: Angka Harapan Hidup, akses ke pengetahuan, dan standar hidup yang layak (Nikolaev, 2014). IPM memberikan ukuran pembangunan keseluruhan yang lebih luas daripada PDB per kapita, karena informasi tentang kesehatan dan pendidikan ditambahkan ke statistik PDB yang terkenal (Özcan & Bjørnskov, 2011). Mengikuti pendekatan kapabilitas Klitgaard & Sen (1985), yang mencoba melacak kapabilitas orang untuk menggunakan kebebasan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Meskipun HDI tidak memperhitungkan dimensi penting lainnya dari kehidupan manusia, namun ini merupakan ukuran terbaik untuk memungkinkan perbandingan sejumlah besar negara dalam jangka waktu yang lama (Nikolaev, 2014).

Penelitian ini mengembangkan empat variabel yang berperan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. *Pertama,* infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, dan transportasi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa investasi dan akses terhadap infrastruktur dasar berkontribusi signifikan dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, yang semuanya merupakan komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Guevara-Rosero, 2023; Hu & Li, 2022; Medeiros dkk., 2021; Parikh dkk., 2015).

Kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya merupakan komponen utama IPM. Penelitian di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Nyoman dkk., 2021). Selain itu, penelitian di Kabupaten Bekasi memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Suprapto dkk., 2022). Studi lintas negara ASEAN dan Pakistan juga menegaskan adanya hubungan kausal yang saling memengaruhi antara pertumbuhan ekonomi dan IPM, di mana pertumbuhan ekonomi memungkinkan tercapainya tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi, dan sebaliknya, peningkatan IPM membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Elistia & Syahzuni, 2018; Taqi dkk., 2021).

Ketiga, kemiskinan. Penelitian di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah IPM wilayah tersebut (Nasution dkk., 2024). Hasil serupa juga ditemukan di Provinsi Lampung, di mana kemiskinan secara signifikan menurunkan IPM, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan (Safitri dkk., 2024). Studi lain di tingkat nasional menegaskan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif langsung yang signifikan terhadap IPM, dan penurunan kemiskinan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiryawan & Pratiwi, 2024).

Terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT). Beberapa studi empiris di Indonesia dan internasional telah meneliti pengaruh tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, meskipun arah dan signifikansinya dapat bervariasi tergantung pada konteks wilayah dan variabel lain yang terlibat.

Variabel sanitasi layak, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka dipilih sebagai prediktor kesejahteraan masyarakat didasarkan pada landasan teori pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial. Sanitasi layak merupakan indikator fundamental dari infrastruktur dasar yang berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang memadai berkontribusi pada penurunan penyakit menular, peningkatan produktivitas, dan dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan *capability* Amartya Sen. Pertumbuhan ekonomi secara teoritis diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan peluang ekonomi dan peningkatan pendapatan. Namun, literatur terbaru menunjukkan bahwa tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi dapat bersifat eksklusif dan gagal meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Kemiskinan merupakan ukuran langsung dari keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan dalam berbagai studi, kemiskinan selalu memiliki relasi kuat terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mencerminkan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak dan berpengaruh terhadap pendapatan, stabilitas sosial, serta partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, keempat variabel ini dipilih karena secara teoritis dan empiris saling terkait dalam menjelaskan dinamika kesejahteraan masyarakat di tingkat regional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi 3 Kota dan 21 Kabupaten mulai tahun 2018 sampai tahun 2023 merupakan data yang akan digunakan dalam penelitian, dengan alat pengolahan data analisis data adalah *software eviews*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen (Y) yaitu kesejahteraan yang dibagi menjadi (Y=0, IPM < 71 = kurang sejahtera) dan (Y=1, IPM > 70 = sejahtera). Variabel independen ada empat yaitu, diantaranya: 1) Akses pelayanan dasar (SL), yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (Persen); 2) pertumbuhan ekonomi (PE), yaitu pertumbuhan ekonomi yaitu Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen); 3) Kemiskinan (POV) yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0) (Persen) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu Persentase Pengangguran Terbuka bulan Agustus (Persen).

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi melalui bantuan *software eViews*. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari jumlah sampel, nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logit.

Metode regresi logit digunakan pada penelitian ini karena adanya variabel dependen yang bersifat dikotomi adapun yang dimaksud dengan variabel dikotomi yaitu dengan adanya 2 kategori yang pada penelitian ini kategori 0 untuk kabupaten/kota tidak sejahtera dan kategori 1 kabupaten/kota tidak sejahtera.

Model analisis regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Ln\left(\frac{KS}{1-KS}\right) = \beta_0 + \beta_1 SL + \beta_2 PE + \beta_3 POV + \beta_4 TPT + \varepsilon}$$

Keterangan:

$Ln\left(\frac{KS}{1-KS}\right)$ = Probabilitas masyarakat yang mengalami kesejahteraan dan tidak mengalami kesejahteraan

$\beta 0$ = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi sanitasi layak (SL)

β_2 = Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (PE)

β_3 = Koefisien regresi kemiskinan (POV)

β_4 = Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi logistik (*logistic regression*) merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen. Oleh karena itu, analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel independennya. Namun penelitian tetap menggunakan uji multikolineritas. Uji multikolinearitas menggunakan cara *Tolerance* dan *Variance-Inflation Factor* (VIF). Apabila hasil menunjukkan nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 membuktikan bahwa adanya multikolinearitas antar variabel independen, tetapi apabila sebaliknya hasil menunjukkan nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan VIF < 10 menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali & Ratmono, 2017).

Selanjutnya dilanjutkan pengujian analisis regresi logistik melalui 3 tahapan yaitu: uji kelayakan model regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*), uji nilai persentase akurasi hasil prediksi (*Percently Correctly Predicted*) atau biasa disebut sebagai matriks klasifikasi dan koefisien determinasi (McFadden R Squared). Uji hipotesis menggunakan uji *Wald* dilakukan untuk membuktikan ada atau tidak pengaruh dari variabel bebas/ variabel independen (variabel x) terhadap variabel terikat/ variabel dependen (variabel y). Terakhir, dilakukan pengujian *Odds Ratio*, dikarenakan analisis regresi logistik data panel tidak dapat dibaca langsung dari nilai koefisiennya sehingga membutuhkan *odds ratio* dengan melakukan eksponensial dari nilai koefisien setiap variabel kemudian apabila telah diperoleh nilai *exponensial (b)* atau disebut juga dengan *odds ratio* maka model dapat diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 berikut menunjukkan hasil uji statistika deskriptif.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uraian	Kesejahteraan (IPM)	SL	PE	POV	TPT
Mean	0.56	86.39	4.50	9.47	4.27
Median	1.00	89.07	5.01	8.88	3.70
Maximum	1.00	99.09	15.45	15.48	15.92
Minimum	0.00	45.78	-10.87	4.28	0.58
Std. Dev.	0.50	10.52	3.11	2.89	2.49
Skewness	-0.22	-1.46	-0.79	0.16	1.95
Kurtosis	1.05	5.02	6.75	1.94	7.68
Observations	144	144	144	144	144

Sumber: E-views 13.0 (data diolah) (2025)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 144 observasi, diperoleh karakteristik masing-masing variabel sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia/IPM)

Rata-rata IPM sebesar 0,56 dengan standar deviasi 0,50, menunjukkan bahwa lebih dari separuh daerah sudah mencapai kategori IPM tinggi (IPM ≥ 60). Nilai minimum IPM adalah 0 (kategori IPM rendah) dan maksimum 1 (kategori IPM tinggi). Distribusi IPM cenderung simetris dengan nilai *skewness* sebesar -0,22 dan kurtosis sebesar 1,05, mengindikasikan distribusi relatif normal namun agak *platykurtic* (kurva lebih datar dari normal).

Sanitasi Layak (SL)

Rata-rata tingkat akses sanitasi layak sebesar 86,39%, dengan median 89,07%, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah memiliki akses sanitasi memadai. Nilai minimum sebesar 45,78% dan maksimum 99,09% mengindikasikan adanya disparitas antar daerah. *Skewness* -1,46 menunjukkan distribusi yang condong ke kanan (negatively skewed), sedangkan kurtosis 5,02 menunjukkan distribusi *leptokurtic* (puncak distribusi lebih tinggi dibanding normal).

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata 4,50% dengan standar deviasi 3,11. Nilai minimum -10,87% menunjukkan adanya wilayah yang mengalami kontraksi ekonomi, sedangkan maksimum mencapai 15,45%. *Skewness* -0,79 menandakan distribusi miring ke kanan, dengan kurtosis 6,75 yang menunjukkan distribusi *leptokurtic*.

Tingkat Kemiskinan (POV)

Rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 9,47% dengan standar deviasi 2,89%. Median sebesar 8,88% menunjukkan bahwa setengah wilayah memiliki tingkat kemiskinan di bawah 9%. *Skewness* 0,16 mengindikasikan distribusi hampir simetris, dan kurtosis 1,94 mendekati distribusi normal.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan rata-rata sebesar 4,27% dengan standar deviasi 2,49%. Nilai minimum sebesar 0,58% dan maksimum sebesar 15,92% menunjukkan variasi antar wilayah. *Skewness* 1,95 menandakan adanya kemiringan ke kiri (positively skewed), dan kurtosis 7,68 memperlihatkan karakteristik *leptokurtic*, menandakan beberapa daerah memiliki angka pengangguran yang sangat tinggi dibanding rata-rata.

Uji Multikolineritas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 2, semua variabel independen tidak terjadi multikolineritas pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini karena mempunyai nilai VIF < 10.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	Centered VIF	Interpretasi
SL (Sanitasi Layak)	1,250	Tidak ada multikolinearitas
PE (Pertumbuhan Ekonomi)	1,065	Tidak ada multikolinearitas
POV (Kemiskinan)	1,378	Tidak ada multikolinearitas
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	1,305	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: E-views 13.0 (data diolah) (2025)

Analisis Regresi Logit

Uji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test)

Uji dimaksudkan untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak terdapat perbedaan antara model dengan data yang dipakai mampu diterima sehingga model bisa dikatakan fit dan sesuai dengan data observasinya. Apabila nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* < 0,05 oleh sebab itu hipotesis nol ditolak karena adanya perbedaan yang signifikan antara model dan nilai observasinya sehingga tidak bisa memperkirakan nilai observasinya, sedangkan apabila nilai stastistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* > 0,05 oleh sebab itu hipotesis nol diterima karena model bisa memperkirakan nilai observasinya dan cocok dengan data observasinya (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 3
Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification			
Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests			
H-L Statistic	6.159	Prob. Chi-Sq (8)	0.6294
Andrews Statistic	14.2692	Prob. Chi-Sq (10)	0.1611

Sumber: E-views 13.0 (data diolah) (2025)

Tabel 3 menunjukkan kelayakan model dengan menggunakan uji *Hosmer-Lemeshow* menghasilkan nilai p sebesar 0,6294, menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang baik dengan data (p > 0,05). Selain itu, uji *Andrews* juga mendukung hasil tersebut dengan *p-value* sebesar 0,1611. Dengan demikian, model logistik yang dibangun dinyatakan sesuai dan layak untuk digunakan dalam analisis prediksi kesejahteraan masyarakat.

Uji Nilai Persentase Akurasi Hasil Prediksi (*Percently Correctly Predicted*)

Percent Correctly Predicted merupakan metode dalam analisis regresi logistik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat akurasi prediksi model. Semakin tinggi persentase akurasi yang diperoleh, maka semakin kecil perbedaan antara data hasil prediksi dan data aktual, yang menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kualitas prediksi yang baik. Sebaliknya, semakin rendah nilai akurasi, semakin besar perbedaan antara hasil prediksi dan data observasi, sehingga model dianggap kurang baik dalam menjelaskan fenomena yang diteliti (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 4
Hasil Uji Persentase Akurasi Hasil Prediksi

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification						
Equation: UNTITLED						
Success cutoff: C = 0.5						
	Estimated Equation			**Constant Probability**		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
% Correct	75	86.25	81.25	0	100	55.56
% Incorrect	25	13.75	18.75	100	0	44.44

Sumber: E-views 13.0 (data diolah) (2025)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji *percently correctly predicted* ini didapatkan nilai persentase sebesar 86,25%. Nilai ini memiliki pengertian bahwa model penelitian memiliki ketepatan sebesar 86,25% dalam memprediksi kesejahteraan masyarakat. Sehingga model penelitian dapat disimpulkan sudah tergolong sangat baik.

Koefisien Determinasi (McFadden R- Squared)

Tabel 6 hasil koefisien-determinasi (McFadden R-Squared) memperlihatkan bahwa nilai *McFadden R-squared* sebesar 0,390 atau 39%. Hasil ini yang memperlihatkan bahwa variabel independen bisa mendeskripsikan variabel dependen dalam penelitian sebesar 39% sedangkan sebesar 61% menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini merupakan kesejahteraan masyarakat sangat terbatas dan yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Umumnya, *McFadden R²* antara 0,2–0,4 dianggap "*good fit*" (Hosmer dkk., 2013).

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Logit

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-16.654	4.244	-3.924	0.000
SL	0.189	0.042	4.479	0.000
PE	-0.199	0.089	-2.251	0.024
POV	-0.007	0.096	-0.074	0.941
TPT	0.322	0.145	2.218	0.027
McFadden R-squared	0.390	Mean dependent var		0.556
LR statistic	77.156	Avg. log likelihood		-0.419
Prob (LR statistic)	0.000			
Obs with Dep=0	64	Total obs		144
Obs with Dep=1	80			

Sumber: E-views 13.0 (data diolah) (2025)

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada Tabel 6 maka di dapatkan persamaan regresi logistiknya yaitu:

$$Ln\left(\frac{KS}{1-KS}\right) = -16{,}654 + 0{,}189SL - 0{,}199PE - 0{,}007POV + 0{,}322TPT + \varepsilon$$

Nilai koefisien regresi dari sanitasi layak (SL) sebesar 0,189 dengan arah koefisien regresi positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan sanitasi layak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang kesejahteraan. Setiap peningkatan 1 unit dalam SL (persentase sanitasi layak) meningkatkan peluang IPM > 71. Nilai koefisien regresi dari pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar -0,199 dengan arah koefisien regresi negatif dengan nilai probabilitas sebesar 0,024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya, dalam kasus ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi justru terkait dengan penurunan peluang kesejahteraan, hal kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi tidak merata.

Nilai koefisien regresi dari kemiskinan (POV) sebesar -0,199 dengan arah koefisien regresi negatif dengan nilai probabilitas sebesar 0,941. Hal ini menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nilai koefisien regresi dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,322 dengan arah koefisien regresi positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,027. Hal ini menunjukkan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang kesejahteraan.

Berdasarkan hasil perhitungan *odds ratio*, diperoleh bahwa variabel sanitasi layak (SL) memiliki nilai *odds ratio* sebesar 1,208. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan akses sanitasi layak sebesar satu satuan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sebesar 20,8%, dengan arah pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik. Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) menunjukkan *odds ratio* sebesar 0,819, yang berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan justru berhubungan dengan penurunan peluang kesejahteraan sebesar 18,1%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mungkin belum sepenuhnya inklusif atau merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 7 menunjukkan variabel kemiskinan (POV) memiliki *odds ratio* sebesar 0,993, yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan, namun tidak signifikan secara statistik. Artinya, tingkat kemiskinan yang diukur dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang cukup berarti terhadap peluang kesejahteraan dalam model ini. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki *odds ratio* sebesar 1,380, yang mengindikasikan bahwa peningkatan TPT sebesar satu satuan justru meningkatkan peluang kesejahteraan sebesar 38,0%. Meskipun hasil ini terlihat kontradiktif, kemungkinan besar fenomena ini disebabkan oleh faktor lain, seperti peningkatan partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi di daerah dengan kesejahteraan lebih baik. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya sanitasi layak dan kualitas pertumbuhan ekonomi sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Tabel 7
Perhitungan Odds Rasio

Variabel	Koefisien (B)	Odds Ratio (Exp(B))	Interpretasi
SL (Sanitasi Layak)	0.189	1.208	Setiap kenaikan 1 unit sanitasi layak meningkatkan peluang kesejahteraan sebesar 20,8%.
PE (Pertumbuhan Ekonomi)	-0.199	0.819	Setiap kenaikan 1 unit pertumbuhan ekonomi menurunkan peluang kesejahteraan sebesar 18,1%.
POV (Kemiskinan)	-0.007	0.993	Tidak signifikan; peluang kesejahteraan turun sangat kecil dan tidak berarti.
TPT (Pengangguran)	0.322	1.38	Setiap kenaikan 1 unit TPT meningkatkan peluang kesejahteraan sebesar 38,0%.

Sumber: Hasil Olah Data (Penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 7 hasil perhitungan *odds ratio* masing-masing variabel, dapatkan di uraikan sebagai berikut:

Sanitasi Layak (SL)

Koefisien positif sebesar 0.189 menghasilkan nilai *odds ratio* sebesar 1.208, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen poin dalam akses terhadap sanitasi layak akan meningkatkan peluang suatu daerah mencapai kesejahteraan (IPM ≥ 71) sebesar 20,8%, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti sanitasi memiliki peran strategis dalam menunjang capaian dimensi kesehatan dan pendidikan dalam IPM, terutama di wilayah yang sebelumnya tertinggal secara layanan sanitasi.

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Koefisien negatif sebesar -0.199 memberikan nilai *odds ratio* sebesar 0.819, artinya setiap peningkatan 1 persen poin dalam laju pertumbuhan ekonomi justru menurunkan peluang kesejahteraan sebesar 18,1%. Meskipun secara teoritis pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkatkan kesejahteraan, hasil ini mengindikasikan adanya *growth without equity* atau

pertumbuhan yang tidak merata, di mana manfaat ekonomi belum menjangkau lapisan masyarakat terbawah atau belum mampu memperbaiki indikator pendidikan dan kesehatan sebagai komponen IPM.

Kemiskinan (POV)

Nilai koefisien -0.007 dengan *odds ratio* sebesar 0.993 menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan hanya menurunkan peluang kesejahteraan sebesar 0,7%, namun hasil ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini menandakan bahwa meskipun kemiskinan penting secara teoritis, dalam konteks model ini dan data yang digunakan, kemiskinan belum terbukti secara kuat sebagai prediktor langsung terhadap kategori IPM tinggi atau rendah. Bisa jadi, kemiskinan mempengaruhi kesejahteraan secara tidak langsung melalui indikator lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Koefisien positif sebesar 0.322 dengan *odds ratio* sebesar 1.380 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 persen poin dalam tingkat pengangguran terbuka meningkatkan peluang kesejahteraan sebesar 38%. Hasil ini tampak kontradiktif secara teori, karena pengangguran biasanya berkonotasi negatif terhadap kesejahteraan. Namun, secara empirik bisa dijelaskan bahwa wilayah dengan IPM tinggi cenderung berada di kawasan urban dengan akses pendidikan yang baik, tetapi secara bersamaan memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi akibat *mismatch* tenaga kerja atau meningkatnya partisipasi angkatan kerja terdidik.

Pembahasan

Pengaruh Sanitasi Layak (SL) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variabel sanitasi layak (SL) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Temuan ini ditunjukkan oleh nilai *odds ratio* sebesar 1,208, yang berarti bahwa peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi layak meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat sebesar 20,8%. Secara empiris, studi WHO (2022) di negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan cakupan sanitasi sebesar 10% berkorelasi dengan penurunan 15% angka kematian balita dan peningkatan 0,3 tahun angka harapan hidup. Mekanisme kausalnya bekerja melalui perbaikan kesehatan lingkungan yang berdampak pada: (1) penurunan prevalensi penyakit berbasis lingkungan, (2) peningkatan produktivitas kerja, dan (3) penghematan biaya kesehatan rumah tangga. Di Sulawesi Selatan, disparitas IPM antar kabupaten (64,2-78,5) menunjukkan korelasi kuat dengan variasi cakupan sanitasi (50-85%), sebagaimana dilaporkan BPS (2023).

Infrastruktur dasar yang diukur dengan sanitasi layak terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi pada sanitasi tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang besar, seperti penghematan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas. Setiap investasi sebesar US$1 pada sanitasi dapat menghasilkan pengembalian ekonomi hingga US$9,1–US$11,2, yang menunjukkan bahwa sanitasi adalah investasi yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Andrés dkk., 2021; Van Minh & Hung, 2011). Selain itu, akses sanitasi yang lebih baik juga meningkatkan kepuasan hidup dan waktu luang masyarakat, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Dickinson dkk., 2015; Van Minh & Hung, 2011).

Penelitian di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur dasar, termasuk sanitasi layak, berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Di Brazil, peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, dan listrik secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga,

terutama jika kebijakan publik diarahkan untuk mengurangi ketimpangan akses antar wilayah (Medeiros dkk., 2021). Studi di India juga menemukan bahwa penyediaan infrastruktur meningkatkan literasi, pendapatan, dan menurunkan biaya kesehatan, dengan dampak yang sangat besar pada kelompok rentan seperti perempuan (Parikh dkk., 2015). Di Ghana, akses terhadap infrastruktur publik seperti air bersih dan transportasi terbukti meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga di pedesaan (Mensah dkk., 2014). Sementara itu, di Tiongkok, peningkatan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi berhubungan positif dengan peningkatan pendapatan, suplai tenaga kerja, dan status kesehatan masyarakat (Hu & Li, 2022).

Berbeda dengan hasil penelitian ini, studi yang dilakukan oleh (Asmoyo & Ratnasari, 2022; Saleh dkk., 2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara sanitasi dan kejadian *stunting*. Ketimpangan akses terhadap sanitasi layak antara wilayah pedesaan dan perkotaan menjadi hambatan dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui aspek kesehatan. Lingkungan dengan sanitasi buruk yang disertai dengan kebiasaan hidup yang kurang sehat, serta asupan gizi yang tidak memadai, dapat menjadi faktor penyebab utama meningkatnya angka *stunting*. Oleh karena itu, strategi penurunan prevalensi *stunting* tidak cukup hanya dengan memperluas fasilitas sanitasi yang layak, tetapi juga perlu disertai dengan pemerataan akses air bersih, peningkatan kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat, serta intervensi gizi seimbang (Kwami dkk., 2019; Rah dkk., 2020).

Sanitasi layak memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengurangan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Namun, dampaknya sangat bergantung pada cakupan komunitas, perubahan perilaku, dan konteks lokal. Bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa sanitasi saja tidak selalu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara signifikan tanpa intervensi pendukung lainnya, seperti dijelaskan (Barrington dkk., 2017; Luby, 2014) dampak sanitasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masih terbatas karena desain studi yang lemah, variasi lingkungan, dan perbedaan teknologi sanitasi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi (PE) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan *odds ratio* sebesar 0,819. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi justru menurunkan peluang kesejahteraan sebesar 18,1%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Meskipun banyak bukti empiris mendukung pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan, terdapat pula argumen dan temuan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak positif, bahkan bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan, maka hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan manfaatnya, sementara kelompok rentan tetap tertinggal (Nyoman dkk., 2021).

Selain itu, alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat sasaran dan investasi yang tidak merata juga dapat menyebabkan disparitas kesejahteraan antarwilayah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis meningkatkan IPM secara merata (Nyoman dkk., 2021). Pemerintah perlu mengoptimalkan pengeluaran di bidang kesehatan dan pendidikan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas (Nyoman dkk., 2021). Secara umum, literatur empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM. Namun, pengaruh positif ini sangat bergantung pada pemerataan hasil pertumbuhan, kebijakan

pemerintah, dan faktor-faktor lain seperti pengangguran, inflasi, serta alokasi investasi dan belanja publik. Tanpa pemerataan dan kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memperlebar kesenjangan dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM). Namun, dampak maksimal hanya dapat dicapai jika pertumbuhan tersebut disertai dengan pemerataan, investasi yang inklusif, dan kebijakan pembangunan manusia yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM juga memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi; peningkatan IPM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan IPM (Sultan dkk., 2023; Taqi dkk., 2021). Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau tidak diikuti dengan pemerataan investasi dan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Pengaruh Kemiskinan (POV) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variabel kemiskinan (POV) dalam model ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan nilai probabilitas sebesar 0,941 dan *odds ratio* sebesar 0,993. Ketidakberartian ini dapat disebabkan oleh peran faktor lain yang lebih dominan seperti pendidikan, akses kesehatan, atau kualitas infrastruktur dasar. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga perlu mengintegrasikan aspek multidimensional lain yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan di daerah perlu memperhatikan dimensi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara simultan.

Banyak studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nasution dkk., 2024; Safitri dkk., 2024; Wiryawan & Pratiwi, 2024). Namun, tidak semua penelitian menemukan pengaruh signifikan kemiskinan terhadap IPM. Studi di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Faktor lain seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendidikan justru lebih dominan dalam mempengaruhi IPM (Boangmanalu dkk., 2025).

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan *odds ratio* sebesar 1,380. Meskipun sekilas hasil ini tampak kontradiktif, penjelasan yang logis adalah bahwa di daerah-daerah dengan kesejahteraan relatif lebih tinggi, partisipasi angkatan kerja juga lebih besar sehingga angka pengangguran secara statistik tampak lebih tinggi. Ini mengindikasikan dinamika pasar kerja di daerah berkembang, di mana mobilitas tenaga kerja lebih aktif dan terbuka. Untuk itu, kebijakan daerah perlu diarahkan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja yang produktif melalui pengembangan sektor industri kreatif, penguatan sektor informal, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar.

Studi di Sleman juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran secara signifikan memengaruhi IPM, bersama dengan tingkat kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan (Kawashita & Marseto, 2024). Beberapa argumen yang dapat menjelaskan mengapa pengangguran dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan (IPM) antara lain: (1) Peran pemerintah dalam intervensi sosial, di beberapa wilayah, pemerintah secara aktif mengalokasikan dana untuk program kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi pengangguran. Hal ini dapat meningkatkan komponen IPM seperti harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, meskipun tingkat pengangguran tinggi; (2) Redistribusi dan jaminan sosial, adanya program jaminan sosial dan bantuan langsung tunai kepada pengangguran dapat menjaga daya beli dan akses terhadap layanan dasar, sehingga indikator kesejahteraan tetap terjaga atau bahkan meningkat; (3) Efektivitas program pengentasan kemiskinan, program pengentasan kemiskinan yang efektif dapat menekan dampak negatif pengangguran terhadap kesejahteraan, sehingga peningkatan pengangguran tidak selalu diikuti penurunan IPM.

Penelitian di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pengangguran secara signifikan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Dhiya dkk., 2024). Pengangguran menyebabkan penurunan kepuasan hidup, integrasi sosial, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta kesehatan mental individu (Pohlan, 2019; Voßemer dkk., 2018). Efek negatif ini dapat bertahan lama, bahkan setelah seseorang kembali bekerja, dan semakin parah jika pengangguran berlangsung lama (Pohlan, 2019). Jaminan sosial dan kebijakan pasar tenaga kerja yang baik dapat sedikit mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap kesejahteraan, namun tidak sepenuhnya menghilangkannya (O'Campo dkk., 2015).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan akses sanitasi, reformasi pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif, program pengentasan kemiskinan berbasis multidimensi, dan pengembangan lapangan kerja produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melalui pendekatan model regresi logistik, dengan mempertimbangkan variabel sanitasi layak (SL), pertumbuhan ekonomi (PE), tingkat kemiskinan (POV), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Sanitasi layak (SL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat sebesar 20,8%; (2) Pertumbuhan ekonomi (PE) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan belum bersifat inklusif; (3) Kemiskinan (POV) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dalam model ini, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih kompleks; (4) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang kemungkinan besar mencerminkan dinamika pasar kerja di daerah dengan kesejahteraan relatif lebih tinggi. Secara umu, model regresi logistik yang digunakan menunjukkan kecocokan yang baik, dengan tingkat akurasi prediksi model yang tinggi dan hasil uji *goodness-of-fit* yang memenuhi kriteria statistik.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran sebagai pengambilan kebijakan: (1) Penguatan akses sanitasi. Pemerintah daerah perlu mempercepat program pembangunan dan penyediaan fasilitas sanitasi layak, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, sebagai strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) Reorientasi pertumbuhan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif dan *pro-poor*, melalui penguatan sektor ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor produktif berbasis sumber daya

lokal; (3) Program pengentasan kemiskinan multidimensi. Program pengentasan kemiskinan harus mengintegrasikan pendekatan multidimensi yang meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh; (4) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja yang produktif dan program peningkatan keterampilan (*upskilling* dan *reskilling*) harus diprioritaskan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas.

Untuk penelitian ke depan, disarankan agar menggunakan pendekatan data panel dalam jangka waktu lebih panjang agar dapat menangkap dinamika kesejahteraan antar waktu, memasukkan variabel lain yang relevan seperti indeks pendidikan, infrastruktur dasar, atau indeks ketimpangan wilayah dan menggunakan model pengujian alternatif seperti *regresi logistik multinomial* atau *generalized linear models* (GLM) untuk membandingkan hasil dan mengkaji heterogenitas antar wilayah.

BIBLIOGRAPHY

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, *95*(7–8). https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006

Anand, S., & Sen, A. (2000). Human development and economic sustainability. *World Development*, *28*(12), 2029–2049. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00071-1

Anand, Sidhir. Sen, Amartya. K. (1994). Human Development Index: Methodology and Measurement, Human Development. In *Conflict, Security and Development* (Vol. 16, Issue 1). Report Office Occasional Papers Vol 12.

Andrés, L., Joseph, G., & Rana, S. (2021). The Economic and Health Impacts of Inadequate Sanitation. In *Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science*. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389414.013.561

Asmoyo, O. K., & Ratnasari, V. (2022). Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persentase Stunting pada Balita di Indonesia dengan Pendekatan Regresi Data Panel. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, *11*(3). https://doi.org/10.12962/j23373520.v11i3.80908

Barrington, D. J., Sridharan, S., Shields, K. F., Saunders, S. G., Souter, R. T., & Bartram, J. (2017). Sanitation marketing: A systematic review and theoretical critique using the capability approach. In *Social Science and Medicine* (Vol. 194). https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.10.021

Boangmanalu, N., Nurlina, & Asnidar. (2025). Determinants of the Human Development Index in Pakpak Bharat Regency, Indonesia. *International Journal of Advances in Social Sciences*, 1–2.

Costanza, R., Hart, M., Posner, S., & Talberth, J. (2009). Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress. *Boston University*, *4*, 1–47.

Darsyah, M. Y., Suprayitno, I. J., Otok, B. W., & ... (2018). Spatial modeling for human development index in central java. *South East Asia J …*, *16*(5).

Dhiya, R. M., Lubis, S. N., & Kesuma, S. I. (2024). *Economic Growth, Poverty, Unemployment, and the Human Development Index (HDI) in Mitigating Socio-economic Disparities in North Sumatra (2019-2023): An Econometric Case Study*. *21*(12), 302–311.

Dickinson, K. L., Patil, S. R., Pattanayak, S. K., & Poulos, C. (2015). Nature's call: Impacts of sanitation choices in Orissa, India. *Economic Development and Cultural Change*, *64*(1). https://doi.org/10.1086/682958

Elistia, E., & Syahzuni, B. A. (2018). The Correlation Of The Human Development Index (HDI) Towards Economic Growth (GDP Per Capita) In 10 Asean Member Countries.

JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES), *2*(2). https://doi.org/10.33751/jhss.v2i2.949

Fajri, R. H. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Journal Economic, Accounting, and Business*, *1*(1).

Ganiswari, S. P., Azies, H. Al, Nugraha, A., Luthfiarta, A., & Firmansyah, G. A. (2023). Data-Driven Modeling of Human Development Index in Eastern Indonesia's Region Using Gaussian Techniques Empowered by Machine Learning. *Journal of Applied Geospatial Information*, *7*(2). https://doi.org/10.30871/jagi.v7i2.6757

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariate dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan menggunakan EViews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guevara-Rosero, G. (2023). Regional Infrastructure Effects on the Life Satisfaction of Rural and Urban Residents. A Case Study for Ecuador. *Review of Regional Studies*, *53*(1). https://doi.org/10.52324/001c.74886

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied Logistic Regression: Third Edition. In *Applied Logistic Regression: Third Edition*. https://doi.org/10.1002/9781118548387

Hu, L., & Li, X. (2022). The Impact of Infrastructure Construction on Economic Welfare: Evidence from China. *ACM International Conference Proceeding Series*. https://doi.org/10.1145/3537693.3537730

Kawashita, I. W. R., & Marseto, M. (2024). Analysis of the Influence of Open Unemployment Rate, Poverty Rate, and Economic Growth on the Human Development Index in Sleman Regency. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(12). https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i12.7320

Klitgaard, R., & Sen, A. (1985). Resources, Values and Development. *Journal of Policy Analysis and Management*, *4*(4). https://doi.org/10.2307/3323790

Kuznets, S. (1934). National Income, 1929-1932. *NBER, National Bureau of Economic Research, June*, 1–12.

Kwami, C. S., Godfrey, S., Gavilan, H., Lakhanpaul, M., & Parikh, P. (2019). Water, sanitation, and hygiene: Linkages with stunting in rural Ethiopia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16*(20). https://doi.org/10.3390/ijerph16203793

Luby, S. (2014). Is targeting access to sanitation enough? In *The Lancet Global Health* (Vol. 2, Issue 11). https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70326-2

Marcuss, R. D., & Kane, R. E. (2007). U.S. National Income and Product Statistics: Born of the Great Depression and World War II. *Bureau of Economic Analysis: Survey of Current Business*, *82*(2), 32–46.

Mark Mitchell, P. (2016). The Capability Approach: From Theory to Practice. *Journal of Human Development and Capabilities*, *17*(2), 295–296. https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1155794

McCulla, S H; and Smith, S. (2007). Measuring the economy: A primer on GDP and the National Income and Product Accounts. In *Measuring the Economy: A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts*. Bureau of Economic Analysis.

Medeiros, V., Ribeiro, R. S. M., & Amaral, P. V. M. do. (2021). Infrastructure and household poverty in Brazil: A regional approach using multilevel models. *World Development*, *137*. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105118

Mensah, E. J., Huchet-Bourdon, M., & Latruffe, L. (2014). Infrastructure access and household welfare in Rural Ghana. *African Development Review*, *26*(3). https://doi.org/10.1111/1467-8268.12107

Nansadiqa, L., Masbar, R., & Shabri, M. (2019). Does economic growth matter for poverty reduction in Indonesia? *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, *2*(2).

Nasution, A. R. , Handayani, A. , Rinaldi, R. , Angelia, T. , Siahaan, T. E. G. , & Hutabarat, F. B. (2024). The Effect of Poverty Level on Human Development Index (HDI) in North Sumatera Province in 2018. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, *435*(442), 4–2.

Nikolaev, B. (2014). Economic freedom and quality of life: Evidence from the OECD's your better life index. *Journal of Private Enterprise*, *29*(3).

Nyoman, D., Melayanti, A., & Bagus Indrajaya, G. (2021). The effect of investment, government expenditure and economic growth on community welfare. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5).

O'Campo, P., Molnar, A., Ng, E., Renahy, E., Mitchell, C., Shankardass, K., St. John, A., Bambra, C., & Muntaner, C. (2015). Social welfare matters: A realist review of when, how, and why unemployment insurance impacts poverty and health. *Social Science and Medicine*, *132*. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.03.025

Özcan, B., & Bjørnskov, C. (2011). Social trust and human development. *The Journal of Socio-Economics*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053535711000953

Parikh, P., Fu, K., Parikh, H., McRobie, A., & George, G. (2015). Infrastructure Provision, Gender, and Poverty in Indian Slums. *World Development*, *66*. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.014

Pertiwi, Y., Dony Permana, Nonong Amalita, & Admi Salma. (2023). Modeling Human Development Index in Papua and West Sumatera with Multivariate Adaptive Regression Spline. *UNP Journal of Statistics and Data Science*, *1*(3). https://doi.org/10.24036/ujsds/vol1-iss3/54

Pohlan, L. (2019). Unemployment and social exclusion. *Journal of Economic Behavior and Organization*, *164*. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.006

Rah, J. H., Sukotjo, S., Badgaiyan, N., Cronin, A. A., & Torlesse, H. (2020). Improved sanitation is associated with reduced child stunting amongst Indonesian children under 3 years of age. *Maternal and Child Nutrition*, *16*(S2). https://doi.org/10.1111/mcn.12741

Robeyns, I. (2003). Sen's capability approach and gender inequality: Selecting relevant capabilities. *Feminist Economics*, *9*(2–3), 61–92. https://doi.org/10.1080/1354570022000078024

Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: a theoretical survey. *Journal of Human Development*, *6*(1), 93–117. https://doi.org/10.1080/146498805200034266

Robeyns, I. (2006). The capability approach in practice. *Journal of Political Philosophy*, *14*(3), 351–376. https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2006.00263.x

Safitri, A. D., Vrasetya, E. P., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung . *JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *1*(2), 13–27.

Saleh, R. C., Atiyatna, D. P., Darma, D., & Sari, P. (2021). Environmental Sanitation , Poverty , and Stunting in Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and …*, *10*(2).

Sen, A. (1979). The Welfare Basis of Real Income Comparisons: A Survey. *Journal of Economic Literature*, *17*(1), 1–45.

Sen, Amartya. K. (1980). *Equality of What?. In: McMurrin S Tanner Lectures on Human Values*. Cambridge university press.

Sen, Amartya. K. (1982). *Choice, Welfare and Measurement*. Basil Blackwell.

Sen, Amartya. K. (1988). *The Concept of Development. In: Chenery H, Srinivasan TN Handbook of Development Economics*. North Holland.

Stiglitz, Joseph; Sen, Amartya; and Jean, P. F. (2010). *Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up*. The New Press.

Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198

Suprapto, H. A., Sumaryoto, S., & Saleh, S. (2022). The Effect Of Investment On Economic Growth And Human Development Index And Community Welfare (Case Study In Bekasi Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *6*(1). https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4705

Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2009). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, *89*(1). https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.08.003

Taqi, M., Ali, M. S. e, Parveen, S., Babar, M., & Khan, I. M. (2021). An analysis of Human Development Index and Economic Growth. A case study of Pakistan. *IRASD Journal of Economics*, *3*(3). https://doi.org/10.52131/joe.2021.0303.0042

UNDP. (2016). *Human development report 2016. Technical notes*. UNDP 2016. %0Ahdr.undp.org › sites › default › files › hdr2016_technical_notes_0

UNDP (United Nations Development Programme). (2022). Human Development Report 2021-22. In *UNDP (United Nations Development Programme)*.

Van Minh, H., & Hung, N. V. (2011). Economic Aspects of Sanitation in Developing Countries. In *Environmental Health Insights* (Vol. 5). https://doi.org/10.4137/EHI.S8199

Voßemer, J., Gebel, M., Täht, K., Unt, M., Högberg, B., & Strandh, M. (2018). The Effects of Unemployment and Insecure Jobs on Well-Being and Health: The Moderating Role of Labor Market Policies. *Social Indicators Research, 138*(3). https://doi.org/10.1007/s11205-017-1697-y

Wiryawan, K. J., & Pratiwi, I. A. M. (2024). Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan dan IPM di Provinsi-Provinsi Indonesia. *Gemawisata Jurnal Ilmiah*, *20*(3), 198–124.